

BAB VI

KESIMPULAN

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, yang sering kali dianggap korup dan tidak efektif, menjadi salah satu penyebab utama apatisme politik. Rasa tidak percaya ini mendorong masyarakat untuk merasa bahwa partisipasi mereka dalam politik tidak akan membawa perubahan nyata. Selain itu, kurangnya pendidikan politik menyebabkan banyak orang tidak memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam demokrasi. Hal ini diperparah oleh ketimpangan ekonomi dan sosial yang membuat sebagian besar masyarakat merasa terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam proses politik. Jarak antara masyarakat dan elite politik juga menambah kerumitan situasi ini, karena kebijakan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan atau kepentingan rakyat.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, Gereja berupaya untuk menjadi agen perubahan melalui pendidikan politik dan program-program sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan. Gereja memiliki peran unik karena sebagai institusi keagamaan, mereka memiliki kepercayaan dan pengaruh moral yang dapat mendorong jemaat untuk lebih aktif dalam kehidupan politik. Program Gerakan Kebangsaan Indonesia adalah salah satu contoh upaya Gereja untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan jemaat. Program ini bertujuan untuk mendidik jemaat tentang pentingnya partisipasi politik, baik melalui pemilu maupun melalui kegiatan politik lainnya.

Namun, keterlibatan Gereja dalam politik juga menimbulkan pertanyaan tentang pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks demokrasi, penting untuk menjaga agar institusi keagamaan tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis. Gereja harus berhati-hati untuk tidak mendukung partai politik atau calon tertentu, melainkan fokus pada penyebaran nilai-nilai moral dan etika yang universal. Ini penting untuk menjaga netralitas Gereja dan menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak integritas moral mereka.

Selain itu, meskipun telah ada peningkatan dalam partisipasi politik jemaat melalui berbagai inisiatif, masih ada ruang yang luas untuk perbaikan.

Peningkatan partisipasi ini perlu dilanjutkan dengan upaya yang lebih sistematis dan terorganisir. Gereja dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses ini, menyediakan platform untuk diskusi dan debat yang konstruktif tentang isu-isu politik dan sosial. Dengan demikian, jemaat dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang realitas politik dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara positif.

Penting juga untuk dicatat bahwa peran Gereja tidak hanya terbatas pada pendidikan politik. Gereja juga berperan dalam mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi, yang merupakan aspek penting dari demokrasi yang sehat. Melalui program-program sosial, Gereja dapat membantu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi politik. Gereja juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pendidikan politik yang inklusif, yang melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang marginal dan kurang terwakili.

Selain itu, Gereja dapat memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk menyebarkan informasi politik yang akurat dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan jemaat. Dalam era digital, akses informasi yang cepat dan luas menjadi kunci untuk membentuk opini publik yang berdasarkan fakta. Gereja dapat memanfaatkan platform ini untuk memberikan pendidikan yang tepat dan informasi yang relevan tentang isu-isu politik dan sosial.

Dalam jangka panjang, tujuan dari semua upaya ini adalah untuk membentuk masyarakat yang lebih sadar politik, di mana setiap individu merasa bahwa suara mereka penting dan dapat membawa perubahan. Gereja memiliki peran besar dalam mencapai tujuan ini dengan terus mempromosikan pendidikan politik yang kritis dan inklusif. Mereka harus memastikan bahwa semua anggota masyarakat memahami peran mereka dalam demokrasi dan merasa diberdayakan untuk berpartisipasi.

Selain itu, Gereja harus memperhatikan isu-isu global yang memiliki dampak lokal, seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan ekonomi global.

Gereja harus memainkan peran proaktif dalam menanggapi isu-isu ini dan mendidik jemaat tentang dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Gereja dapat membantu jemaat mengembangkan perspektif yang lebih luas dan lebih kritis tentang politik dan kebijakan publik. Penulis menekankan bahwa Gereja memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk sikap politik yang positif dan konstruktif di kalangan jemaatnya. Ini hanya dapat dicapai melalui upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi, dengan tujuan akhir membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Gereja harus terus bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya, baik di dalam maupun di luar lingkungan keagamaan, untuk menciptakan sinergi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi.

